

**PENGARUH BUDAYA DAN SISTEM SOSIAL MASYARAKAT TERHADAP RUMAH SAKIT
SEBAGAI INSTITUSI MEDIS: KAJIAN PUSTAKA TENTANG PENYESUAIAN HUKUM
KESEHATAN UNTUK MENINGKATKAN PENERIMAAN LAYANAN KESEHATAN OLEH
PASIE**

Hotmaria Hertawaty Sijabat

Postgraduate Faculty of Law Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

sjabathotmaria@gmail.com

Gunawan Widjaja

Senior Lecturer Faculty of Law Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

widjaja_gunawan@yahoo.com

Abstract

This study examines the influence of culture and social systems on hospitals as medical institutions and the importance of adjusting health laws to improve patient acceptance of health services. In a pluralistic society, cultural values and social structures are key factors that influence patients' perspectives, attitudes, and behaviour towards medical services. This literature review collects and analyses academic literature, legal regulations, and related case studies to identify the complex relationship between cultural, social, and health law aspects. The results of the study show that understanding and accommodating cultural diversity and social systems through inclusive and adaptive health law adjustments are essential to creating effective, humane medical services and increasing patient satisfaction and trust. This study provides recommendations for policymakers to develop health law regulations that are responsive to cultural and social diversity in order to support more equitable and equitable access to and quality of health services.

Keywords: *community culture, social system, hospital, health law, health service acceptance, medical services, inclusive regulations.*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji pengaruh budaya dan sistem sosial masyarakat terhadap rumah sakit sebagai institusi medis serta pentingnya penyesuaian hukum kesehatan dalam meningkatkan penerimaan layanan kesehatan oleh pasien. Dalam konteks masyarakat yang majemuk, nilai-nilai budaya dan struktur sosial menjadi faktor utama yang memengaruhi cara pandang, sikap, dan perilaku pasien terhadap pelayanan medis. Kajian pustaka ini mengumpulkan dan menganalisis literatur akademik, regulasi hukum, dan studi kasus terkait guna mengidentifikasi hubungan kompleks antara aspek budaya, sosial, dan hukum kesehatan. Hasil kajian menunjukkan bahwa memahami dan mengakomodasi keberagaman budaya serta sistem sosial masyarakat melalui penyesuaian hukum kesehatan yang inklusif dan adaptif sangat penting untuk menciptakan pelayanan medis yang efektif, manusiawi, dan meningkatkan tingkat kepuasan serta kepercayaan pasien. Penelitian ini memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan untuk mengembangkan regulasi hukum kesehatan yang responsif terhadap keberagaman budaya dan sosial guna mendukung akses dan kualitas layanan kesehatan yang lebih adil dan merata.

Kata kunci: budaya masyarakat, sistem sosial, rumah sakit, hukum kesehatan, penerimaan layanan kesehatan, pelayanan medis, regulasi inklusif.

Pendahuluan

Dalam era globalisasi dan kemajuan teknologi medis yang pesat, rumah sakit sebagai institusi medis memegang peranan krusial dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Namun, keberhasilan institusi medis tidak hanya ditentukan oleh aspek teknis dan fasilitas medis semata, melainkan juga sangat bergantung pada pemahaman terhadap konteks sosial dan budaya masyarakat yang dilayaninya (Mannion, 2018a). Budaya dan sistem sosial masyarakat merupakan dua aspek fundamental yang membentuk cara pandang, sikap, dan perilaku pasien dalam menerima layanan kesehatan. Oleh karena itu, penting bagi rumah sakit untuk memahami dan mengakomodasi nilai-nilai budaya serta struktur sosial masyarakat agar dapat memberikan pelayanan yang efektif dan manusiawi. Penyesuaian ini menjadi semakin signifikan di tengah semakin beragamnya latar belakang budaya yang dihadapi oleh institusi medis (Mannion, 2018b).

Budaya merupakan kumpulan nilai, norma, kepercayaan, dan kebiasaan yang diwariskan dan mempengaruhi pola perilaku individu maupun kelompok dalam masyarakat. Dalam konteks layanan kesehatan, budaya dapat memengaruhi cara pasien memandang penyakit, jenis pengobatan yang dipilih, hingga interaksi dengan tenaga medis. Tidak jarang, perbedaan budaya yang kurang dipahami dapat menjadi penghambat utama dalam proses penyembuhan dan kepuasan pasien (Whyle, 2020). Misalnya, ada masyarakat yang lebih mengutamakan pengobatan tradisional atau memiliki pandangan tertentu tentang penyakit yang bertentangan dengan pendekatan medis modern. Hal ini menimbulkan kebutuhan akan penyesuaian kebijakan dan praktik layanan rumah sakit yang lebih sensitif terhadap keberagaman budaya tersebut (Joshi, 2022).

Selain budaya, sistem sosial dalam masyarakat juga memainkan peranan penting dalam membentuk interaksi sosial di lingkungan rumah sakit. Sistem sosial mencakup struktur sosial, hierarki, dan norma yang mengatur hubungan antaranggota masyarakat. Faktor-faktor seperti status sosial, peran gender, dan hubungan keluarga dapat mempengaruhi akses dan penerimaan layanan medis. Misalnya, dalam masyarakat yang sangat memandang status sosial, penerimaan pasien terhadap layanan kesehatan mungkin berbeda tergantung pada posisi sosial mereka atau kelompok sosial tempat mereka berasal. Ini menuntut rumah sakit untuk memiliki pendekatan yang inklusif dan adaptif agar dapat menjembatani perbedaan tersebut sehingga tercipta komunikasi yang efektif dan pelayanan yang adil (Wulandari, 2025b).

Sementara itu, aspek hukum kesehatan merupakan landasan penting yang mengatur pelaksanaan pelayanan medis di berbagai institusi kesehatan, termasuk rumah sakit. Hukum kesehatan dirancang untuk melindungi hak pasien sekaligus

mengatur kewajiban penyedia layanan kesehatan agar pelayanan berjalan sesuai standar dan etika profesi (Pilli, 2024). Namun, dalam prakteknya, regulasi hukum kesehatan seringkali bersifat umum dan kurang memberikan ruang bagi penyesuaian yang mempertimbangkan keberagaman budaya dan sistem sosial masyarakat yang ada. Kondisi ini dapat menyebabkan jarak atau resistensi dari masyarakat terhadap layanan kesehatan yang diselenggarakan, terutama bila mereka merasa nilai-nilai dan kebutuhan khas budaya tidak diakomodasi secara memadai (Pratama, 2021).

Pentingnya menyelaraskan hukum kesehatan dengan konteks budaya dan sosial masyarakat bukan hanya soal meningkatkan efektivitas layanan, tetapi juga soal menjamin akses, keadilan, dan penghormatan atas hak-hak setiap individu dalam menerima layanan kesehatan. Penyesuaian hukum kesehatan harus mencerminkan pemahaman atas kondisi sosial budaya masyarakat agar memberikan rasa aman, nyaman, dan kepercayaan kepada pasien dalam menggunakan fasilitas rumah sakit. Adaptasi hukum ini menjadi aspek strategis untuk menjembatani perbedaan antara kerangka regulasi yang kaku dengan dinamika keberagaman masyarakat yang terus berkembang (Widiyastuty, 2023).

Berbagai studi telah menunjukkan bahwa kegagalan institusi medis dalam memahami budaya pasien dapat mengakibatkan masalah serius seperti rendahnya tingkat kepatuhan pengobatan, perasaan tidak dihargai, dan bahkan penolakan terhadap layanan. Hal ini tentunya berdampak pada hasil kesehatan secara keseluruhan dan efisiensi pelayanan. Dalam konteks global maupun nasional, rumah sakit menghadapi tantangan besar terkait keberagaman pasien (Wulandari, 2025a). Pasien dengan latar belakang budaya berbeda seringkali memiliki kebutuhan khusus yang harus dipenuhi agar mereka merasa diterima dan nyaman mendapatkan layanan medis. Misalnya, beberapa kelompok masyarakat mungkin memiliki pembatasan agama, bahasa, gaya komunikasi, serta harapan tradisional yang harus dipahami dan dihormati oleh institusi kesehatan. Oleh karena itu, pendekatan yang mengintegrasikan aspek budaya dan sosial ke dalam sistem pelayanan rumah sakit menjadi sebuah keniscayaan di era modern (Kusnanda & Kusumapradja, 2025).

Konteks sosial budaya dan hukum kesehatan yang bersifat dinamis menuntut rumah sakit untuk terus melakukan evaluasi dan inovasi dalam pelayanan. Adaptasi ini bukan hanya masalah teknis, melainkan berkaitan langsung dengan bagaimana rumah sakit mengembangkan budaya organisasi yang inklusif serta memperkuat regulasi internal agar sejalan dengan prinsip keadilan sosial dan hak asasi manusia (Hehalatu, 2025).

Akhirnya, melalui kajian pustaka yang komprehensif ini, penelitian bertujuan untuk menetapkan hubungan yang jelas antara budaya dan sistem sosial masyarakat dengan karakteristik layanan rumah sakit sebagai institusi medis, serta mengidentifikasi titik-titik kritis di mana penyesuaian hukum kesehatan dapat mendorong peningkatan penerimaan pasien.

Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kajian pustaka (literature review) dengan teknik pengumpulan data melalui pencarian dan analisis literatur akademik, regulasi hukum kesehatan, serta studi kasus terkait pengaruh budaya dan sistem sosial masyarakat terhadap rumah sakit sebagai institusi medis. Data dan sumber yang dikaji meliputi jurnal ilmiah, buku, peraturan perundang-undangan, dan dokumen kebijakan kesehatan yang relevan, yang kemudian disintesis secara kritis untuk mengidentifikasi konsep, pola, serta model penyesuaian hukum kesehatan guna meningkatkan penerimaan layanan oleh pasien dengan latar belakang budaya dan sosial yang beragam (Eliyah & Aslan, 2025). Pendekatan ini memungkinkan pemahaman mendalam terhadap interaksi antara aspek budaya, sosial, dan hukum dalam konteks pelayanan kesehatan tanpa melakukan penelitian lapangan langsung (Green et al., 2006).

Hasil dan Pembahasan

Pengaruh Budaya dan Sistem Sosial Masyarakat terhadap Rumah Sakit sebagai Institusi Medis

Budaya sebagai sistem nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat memiliki peranan sentral dalam membentuk pandangan individu terhadap kesehatan dan penyakit. Di banyak masyarakat, budaya menentukan bagaimana seseorang memandang penyebab penyakit, cara pengobatan yang dirasa tepat, serta harapan terhadap interaksi dengan tenaga medis. Oleh karena itu, rumah sakit sebagai institusi medis harus memahami dimensi budaya ini agar dapat menyesuaikan pendekatan pelayanannya sesuai kebutuhan dan kepercayaan pasien. Tanpa pengakuan terhadap keberagaman budaya, risiko terjadinya miskomunikasi dan kesalahpahaman dalam pelayanan kesehatan sangat tinggi (Widjaja, 2023).

Setiap budaya membawa serta persepsi unik tentang kesehatan yang dapat berbeda jauh dari paradigma medis modern. Misalnya, sebagian masyarakat memandang penyakit sebagai akibat dari ketidakseimbangan spiritual atau sosial, bukan semata aspek biologis semata. Pemahaman seperti ini sering mengarahkan pasien untuk mencari pengobatan tradisional atau alternatif sebelum atau bahkan selama menjalani perawatan medis di rumah sakit. Ketiadaan penyesuaian terhadap kepercayaan tersebut di rumah sakit dapat menyebabkan ketidaknyamanan pasien dan menurunkan tingkat kepatuhan terhadap terapi medis yang disarankan (Rogers, 2020). Selain itu, bahasa dan gaya komunikasi yang dipengaruhi budaya juga sangat menentukan kualitas pelayanan kesehatan. Rumah sakit mesti mampu mengelola komunikasi yang efektif dan memahami bahasa tubuh, ekspresi, dan norma bicara berbagai kelompok budaya. Tanpa kemampuan ini, tenaga medis dapat kesulitan menjelaskan prosedur atau diagnosis secara memadai, bahkan memicu ketidakpercayaan pasien. Hal ini menjadi tantangan besar terutama di masyarakat

multietnis atau multibahasa, di mana ketidaksesuaian komunikasi dapat menimbulkan rasa asing dan ketidaknyamanan bagi pasien (Tringale, 2022b).

Sistem sosial masyarakat, yang mencakup struktur sosial, hubungan kekuasaan, dan norma sosial, turut memberi warna penting dalam interaksi rumah sakit dengan pasien. Misalnya, dalam masyarakat yang sangat berorientasi pada hierarki sosial, pola pengambilan keputusan kesehatan mungkin dipengaruhi oleh figur otoritas keluarga atau tokoh masyarakat. Rumah sakit yang tidak memahami sistem sosial ini mungkin gagal mengakomodasi kebutuhan komunikasi dan persetujuan yang tepat sesuai konteks sosial pasien, sehingga pelayanan menjadi kurang efektif (Tringale, 2022a).

Kondisi sosial ekonomi juga bagian dari sistem sosial yang memengaruhi akses dan penerimaan layanan rumah sakit. Pasien dari kelompok sosial ekonomi rendah sering menghadapi hambatan seperti keterbatasan finansial, jarak geografis, dan kurangnya informasi kesehatan yang memadai. Rumah sakit perlu mengembangkan strategi pelayanan yang lebih inklusif dan sensitif terhadap keterbatasan sosial ekonomi ini agar dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara adil dan merata (Carney, 2011).

Interaksi sosial antarpetugas medis dan pasien juga dipengaruhi oleh budaya dan norma sosial yang berlaku. Dalam beberapa budaya, interaksi yang formal dan penuh hormat sangat ditekankan, sementara di budaya lain mungkin lebih santai dan egaliter. Rumah sakit yang mampu menyesuaikan gaya interaksi ini akan lebih mudah membangun kepercayaan dan kenyamanan pasien, yang pada gilirannya meningkatkan efektivitas pelayanan medis (Huang, 2022).

Di sisi lain, tantangan utama yang dihadapi rumah sakit adalah bagaimana mengelola keberagaman budaya dan sosial ini secara sistematis dan berkelanjutan. Tidak cukup hanya dengan pelatihan singkat atau kebijakan parsial, diperlukan pendekatan strategis yang mengintegrasikan sensitivitas budaya dalam seluruh aspek pelayanan, mulai dari penerimaan pasien, diagnosis, terapi, hingga tindak lanjut perawatan. Penyesuaian ini menuntut perubahan budaya organisasi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di rumah sakit (Pognon, 2025).

Pengaruh budaya juga terlihat dalam pola penggunaan layanan kesehatan, misalnya dalam preferensi waktu kunjungan, jenis layanan yang dicari, dan sikap terhadap prosedur medis tertentu. Ada kalanya pasien menolak prosedur tertentu karena alasan budaya atau agama, sehingga rumah sakit harus bisa menawarkan alternatif yang tetap sesuai standar medis. Fleksibilitas semacam ini akan meningkatkan tingkat kepuasan dan kesediaan pasien untuk terus menggunakan layanan rumah sakit (Mistri, 2023).

Norma dan adat istiadat yang melekat dalam sistem sosial masyarakat juga berdampak pada pengelolaan rumah sakit, terutama dalam hal kebijakan internal yang berhubungan dengan hak pasien dan keterlibatan keluarga dalam perawatan. Di beberapa budaya, keputusan medis sering melibatkan keluarga besar sebagai bagian

dari sistem sosial yang kuat. Rumah sakit perlu merancang kebijakan yang menghormati keterlibatan ini tanpa mengabaikan aspek profesionalitas dan privasi pasien (Walkowska, 2023).

Kompleksitas hubungan antarbudaya di rumah sakit memerlukan adanya mediator budaya atau tenaga kesehatan yang memiliki kemampuan lintas budaya. Keberadaan mediator ini dapat menjembatani perbedaan pandangan dan meningkatkan komunikasi yang efektif antara pasien dan tenaga medis. Model ini telah terbukti efektif dalam beberapa konteks untuk mengurangi hambatan budaya dan sosial dalam pelayanan Kesehatan (Han, 2017). Selain itu, sistem sosial masyarakat yang saling berkaitan dengan budaya juga mempengaruhi persepsi tentang peran rumah sakit dan tenaga medis. Dalam beberapa komunitas, ada pandangan bahwa rumah sakit adalah tempat terakhir yang dikunjungi setelah upaya pengobatan tradisional gagal. Pemahaman tentang peran ini penting agar rumah sakit dapat merancang program edukasi dan pendekatan yang tepat untuk mengubah persepsi ini secara bertahap (Ritonga, 2024).

Dinamika sosial juga mempengaruhi bagaimana masyarakat menilai dan merespons kebijakan serta praktik pelayanan rumah sakit. Ketidakadilan sosial, diskriminasi, dan marginalisasi kelompok tertentu dapat memicu ketidakpercayaan pada layanan rumah sakit. Oleh karena itu, rumah sakit harus berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang inklusif dan menjamin hak-hak setiap pasien tanpa diskriminasi sosial. Kondisi pandemi dan krisis kesehatan lainnya semakin memperlihatkan pentingnya penyesuaian budaya dan sosial dalam pelayanan rumah sakit (Siregar, 2021). Saat menghadapi situasi darurat, keberagaman budaya dapat menjadi tantangan sekaligus peluang dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam program kesehatan. Rumah sakit yang responsif budaya dapat membangun kerjasama lebih baik dengan Masyarakat (Pravitasari, 2024).

Pengembangan kebijakan rumah sakit yang berbasis pada pemahaman budaya dan sistem sosial masyarakat menjadikannya institusi yang tidak hanya responsif secara medis tetapi juga secara sosial. Kebijakan ini harus meliputi pelatihan lintas budaya untuk staf medis, penerapan protokol komunikasi yang adaptif, serta penguatan pelayanan berbasis komunitas yang menjawab kebutuhan masyarakat secara spesifik (Miyamoto, 2021).

Dengan demikian, pengaruh budaya dan sistem sosial masyarakat terhadap rumah sakit sebagai institusi medis adalah sangat signifikan dan kompleks. Rumah sakit tidak dapat beroperasi secara efektif jika mengabaikan faktor-faktor ini, karena pelayanan kesehatan yang sukses adalah pelayanan yang tidak hanya berbasis ilmu medis tetapi juga terintegrasi dengan konteks sosial budaya pasien yang dilayani. Menyelaraskan pelayanan dengan budaya dan sosial masyarakat adalah kunci untuk meningkatkan kualitas layanan dan kepuasan pasien.

Penyesuaian Hukum Kesehatan untuk Meningkatkan Penerimaan Layanan Kesehatan oleh Pasien

Hukum kesehatan merupakan kerangka regulasi yang mengatur berbagai aspek pelaksanaan pelayanan kesehatan, termasuk hak dan kewajiban pasien serta penyedia layanan medis. Namun, hukum kesehatan yang ada saat ini sering kali bersifat umum dan kurang memberi ruang bagi penyesuaian terhadap keberagaman budaya dan sistem sosial masyarakat. Ketidaksiuaian ini dapat menjadi penghambat penerimaan layanan kesehatan, karena hukum yang kaku dan tidak sensitif budaya dapat memperburuk jarak komunikasi serta menimbulkan rasa ketidakadilan pada pasien (Awasom, 2024).

Penyesuaian hukum kesehatan yang responsif budaya dan sosial merupakan salah satu langkah strategis untuk meningkatkan penerimaan layanan oleh pasien. Hal ini menuntut pembuat kebijakan hukum untuk mempertimbangkan faktor keberagaman budaya masyarakat dalam merancang peraturan dan prosedur yang lebih inklusif. Hukum yang adaptif ini harus mampu memberi ruang bagi institusi medis untuk menyesuaikan praktik pelayanan sesuai kebutuhan dan keyakinan pasien tanpa mengabaikan standar medis dan keselamatan pasien (Almutairi, 2022).

Salah satu aspek utama yang perlu diperhatikan dalam penyesuaian hukum kesehatan adalah pengakuan terhadap hak pasien yang beragam, termasuk hak untuk mendapatkan pelayanan yang menghormati nilai-nilai budaya, agama, dan bahasa mereka. Hukum kesehatan harus menetapkan standar yang menjamin agar rumah sakit menyediakan fasilitas dan lingkungan pelayanan yang ramah budaya, misalnya dengan menyediakan tenaga kesehatan yang memiliki kemampuan lintas budaya atau jasa penerjemah bahasa untuk pasien dari kelompok minoritas (Mannion, 2018a).

Dalam konteks ini, hukum kesehatan juga harus mengatur keterlibatan keluarga dan komunitas dalam proses pelayanan medis sesuai dengan norma sosial yang berlaku. Beberapa budaya sangat menekankan keputusan kolektif dan peran keluarga dalam proses pengambilan keputusan Kesehatan (Whyle, 2020). Oleh karena itu, hukum harus memberikan ruang bagi rumah sakit untuk mengakomodasi partisipasi ini secara legal dan etis, sehingga pasien merasa didukung secara sosial selama menjalani pengobatan. Selain itu, hukum kesehatan perlu mengatur mekanisme penyelesaian sengketa dan pengaduan yang responsif terhadap isu budaya dan sosial. Pasien yang merasa hak budayanya diabaikan harus mendapatkan akses ke mekanisme perlindungan dan penyelesaian yang adil dan transparan. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan pasien terhadap sistem kesehatan dan mendorong keterbukaan dalam komunikasi antara pasien dan penyedia layanan (Joshi, 2022).

Penyesuaian hukum juga harus mencakup pengaturan standar pelatihan dan pendidikan tenaga kesehatan agar memiliki kompetensi budaya. Regulasi ini sangat penting agar tenaga medis mampu memberikan pelayanan yang tidak hanya klinis berkualitas tetapi juga sensitif terhadap latar belakang budaya pasien. Dengan

demikian, hukum kesehatan berperan dalam memastikan adanya standar profesionalisme yang mencakup aspek sosial budaya (Wulandari, 2025b).

Dalam beberapa negara, adaptasi hukum kesehatan telah dilakukan melalui penerapan konsep "patient-centered care" yang menghargai keberagaman budaya dan sosial pasien sebagai bagian dari pelayanan. Pendekatan ini telah dimasukkan ke dalam regulasi kesehatan sehingga menjadi kewajiban institusi medis untuk menyesuaikan kebijakan dan prosedur layanan mereka berdasarkan kebutuhan budaya dan sosial pasien. Regulasi ini juga mendorong partisipasi aktif pasien dalam proses pengambilan keputusan medis (Pilli, 2024).

Kajian terhadap model-model hukum kesehatan yang responsif budaya menunjukkan perlunya keberpihakan terhadap prinsip keadilan sosial dan hak asasi manusia. Regulasi harus mengatasi diskriminasi dan ketidaksetaraan yang mungkin muncul dari ketidaksesuaian pelayanan terhadap kebutuhan budaya kelompok minoritas. Hal ini menuntut pembuat kebijakan hukum untuk selalu melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam proses perumusan hukum (Pratama, 2021).

Penyesuaian hukum kesehatan juga dapat difokuskan pada pengaturan fleksibilitas prosedur medis yang mengakomodasi keyakinan budaya pasien, misalnya dalam hal penolakan terhadap prosedur tertentu karena alasan agama. Hukum harus memberikan mekanisme agar larangan medis yang berlandaskan pada norma budaya tidak secara otomatis dianggap pelanggaran hukum, tetapi dikelola dengan prinsip-prinsip etika dan keselamatan medis (Widiyastuty, 2023).

Selanjutnya, regulasi hukum kesehatan harus mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan evaluasi pelayanan kesehatan. Melalui mekanisme partisipasi ini, suara kelompok budaya yang beragam dapat didengar dan diperhitungkan dalam perbaikan layanan dan kebijakan rumah sakit. Hal ini sekaligus mempererat hubungan antara masyarakat dan institusi medis sebagai mitra yang saling membutuhkan (Wulandari, 2025a).

Dalam konteks digitalisasi layanan kesehatan, penyesuaian hukum juga penting untuk menjamin akses yang setara dan aman bagi pasien dari berbagai latar belakang budaya dan sosial. Regulasi harus mengatur pemanfaatan teknologi informasi agar tidak menimbulkan kesenjangan akses dan tetap menghormati privasi serta kerahasiaan data pasien. Perumusan hukum kesehatan yang inklusif dan adaptif budaya memerlukan pendekatan kolaboratif antara pemerintah, institusi kesehatan, komunitas budaya, dan akademisi (Kusnanda & Kusumapradja, 2025). Proses dialog ini penting untuk memastikan bahwa regulasi yang dihasilkan dapat diterima secara luas dan mengakomodasi kebutuhan nyata masyarakat yang beragam. Selain itu, harmonisasi hukum kesehatan dengan peraturan lain yang terkait seperti hak asasi manusia, perlindungan sosial, dan kebijakan sosial budaya juga harus menjadi perhatian agar tidak terjadi tumpang tindih atau kontradiksi yang dapat merugikan pasien atau institusi medis (Hehalatu, 2025).

Pengembangan regulasi hukum kesehatan yang adaptif harus didukung dengan kebijakan internal rumah sakit berupa prosedur operasional standar yang memperjelas implementasi hukum dalam praktik pelayanan sehari-hari. Hal ini membantu memastikan bahwa penyesuaian hukum bukan hanya di atas kertas, tetapi terealisasi dengan baik di tingkat layanan (Widjaja, 2023).

Terakhir, penyesuaian hukum kesehatan yang responsif terhadap budaya dan sistem sosial masyarakat merupakan bagian integral dari upaya meningkatkan kualitas layanan kesehatan secara menyeluruh. Dengan adanya hukum yang adaptif, rumah sakit dapat lebih efektif membangun hubungan yang harmonis dengan pasien, meningkatkan kepuasan dan kepercayaan, serta mendorong keterjangkauan dan pemanfaatan layanan kesehatan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Kesimpulan

Budaya dan sistem sosial masyarakat memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap rumah sakit sebagai institusi medis. Nilai-nilai budaya, norma, serta struktur sosial membentuk cara pandang dan perilaku pasien dalam menggunakan layanan kesehatan, yang pada gilirannya mempengaruhi efektivitas dan kualitas pelayanan medis. Rumah sakit perlu memahami keberagaman budaya dan sosial ini secara mendalam agar dapat memberikan pelayanan yang tidak hanya klinis efektif tetapi juga sensitif secara sosial, sehingga pasien merasa diterima, dihormati, dan nyaman selama proses pengobatan.

Penyesuaian hukum kesehatan menjadi aspek kunci dalam menjembatani gap antara kebutuhan budaya dan sosial masyarakat dengan praktik pelayanan medis di rumah sakit. Hukum kesehatan yang responsif dan inklusif terhadap keberagaman budaya dan sistem sosial masyarakat dapat menciptakan kerangka regulasi yang memungkinkan institusi medis menyesuaikan kebijakan dan prosedur layanan dengan lebih fleksibel dan manusiawi. Hal ini meliputi pengakuan terhadap hak pasien beragam budaya, pengaturan partisipasi keluarga, mekanisme penyelesaian sengketa yang sensitif budaya, serta standar kompetensi tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan lintas budaya.

Secara keseluruhan, integrasi antara pemahaman budaya dan sosial bersama dengan penyesuaian hukum kesehatan merupakan strategi yang esensial untuk meningkatkan penerimaan layanan kesehatan oleh pasien. Dengan dukungan regulasi yang adaptif dan pengelolaan pelayanan yang responsif budaya, rumah sakit dapat memperkuat hubungan kepercayaan dengan masyarakat, meningkatkan penggunaan layanan kesehatan, dan pada akhirnya mendukung tercapainya tujuan kesehatan masyarakat yang lebih inklusif dan berkeadilan.

References

- Almutairi, R. L. (2022). Analysis of organizational culture factors that influence healthcare professionals' performance. <https://doi.org/10.1016/j.jhorg.2022.12.006>
- Awasom, F. (2024). Cultural Barriers in Healthcare Delivery: Patient Perspectives. *Journal of Cultural Diversity in Healthcare*. <https://doi.org/10.1016/j.culdiv.2023.01.012>
- Carney, M. (2011). Influence of Organizational Culture on Quality Healthcare. *BMC Health Services Research*. <https://doi.org/10.1186/1472-6963-11-44>
- Eliyah, E., & Aslan, A. (2025). STAKE'S EVALUATION MODEL: METODE PENELITIAN. *Prosiding Seminar Nasional Indonesia*, 3(2), Article 2.
- Green, B. N., Johnson, C. D., & Adams, A. (2006). Writing Narrative Literature Reviews for Peer-Reviewed Journals. *Chiropractic & Manual Therapies*, 52–57.
- Han, M. (2017). Effect of Hospital Nurses' Perceptions of Organizational Health and Patient Safety Culture on Nursing Activities for Patient Safety. <https://doi.org/10.1111/jkana.2017.23.2.127>
- Hehalatu, A. (2025). Pelayanan Kesehatan Gratis dan Perlindungan Hukum: Upaya Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan. *Jurnal Hukum Lingkungan Dan Governance*. <https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/download/1362/679>
- Huang, X. (2022). Hospital Culture and Healthcare Workers' Provision of Patient-Centered Care: Study Findings. *Frontiers in Public Health*. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2022.919608>
- Joshi, A. (2022). The Use of Legal Empowerment to Improve Access to Quality Health Services: Scoping Review. *BMJ Global Health*. <https://doi.org/10.1136/bmjgh-2022-008581>
- Kusnanda & Kusumapradja. (2025). Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan Rumah Sakit: Kajian Sistematis. *Jurnal Gemilang*, 5(3).
- Mannion, R. (2018a). Understanding Organisational Culture for Healthcare Quality Improvement. *BMJ Quality & Safety*. <https://doi.org/10.1136/bmjqs-2017-007472>
- Mannion, R. (2018b). Understanding organisational culture for healthcare quality improvement. <https://doi.org/10.1136/bmjqs-2017-007472>
- Mistri, I. (2023). Enhancing Patient Safety Culture in Hospitals. <https://doi.org/10.1097/psj.0000000000000001>
- Miyamoto, Y. (2021). Culture and Health: Recent Developments and Future Directions. *Social Science & Medicine*. <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2021.114257>
- Pilli, L. (2024). Sources and Processes of Social Influence on Healthcare Decision-Making: A Systematic Review. *Social Science & Medicine*. <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2024.114278>
- Pogonon, P. (2025). Health Workers' Acceptance and Satisfaction on the Usability of Digital Goods in Sierra Leone. <https://doi.org/10.1017/dhr.2025.009>
- Pratama, Y. D. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Pasien BPJS Kesehatan dalam Mendapatkan Pelayanan Kesehatan. <https://e-journal.upr.ac.id/index.php/jem/article/download/2948/2481>
- Pravitasari, R. F. (2024). Definisi Budaya Keselamatan Pasien dan Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Kinerja Karyawan Rumah Sakit: Suatu Studi Systematic

- Literature Review. <https://repository.stikes-yrsds.ac.id/id/eprint/779/3/BAB%20II%20TINJAUAN%20PUSTAKA.pdf>
- Ritonga, A. M. (2024). *Edukasi Hukum Kesehatan untuk Peningkatan Kualitas Pelayanan Rumah Sakit Umum*. <https://ejournal.sisfokomtek.org/index.php/jpkm/article/download/4030/2623/28270>
- Rogers, A. (2020). Multi-site Survey on Social Needs Screening and Patient Attitudes in Healthcare Systems. *Journal of General Internal Medicine*. <https://doi.org/10.1007/s11606-019-05588-1>
- Siregar, P. A. (2021). *Diktat Bahan Ajar Sosial Budaya Kesehatan*. http://repository.uinsu.ac.id/12264/2/Diktat%20Sosial%20Budaya%20Kesehatan_Putra%20Apriadi%20Siregar.pdf
- Tringale, M. (2022a). *Integrating patient values and preferences in healthcare*. <https://doi.org/10.1016/j.pec.2022.03.014>
- Tringale, M. (2022b). Integrating Patient Values and Preferences in Healthcare: Approaches and Congruence. *Patient Education and Counseling*. <https://doi.org/10.1016/j.pec.2022.03.014>
- Walkowska, A. (2023). Enhancing Cross-Cultural Competence of Medical and Nursing Students: Impact of Cross-Cultural Interactions. *BMC Medical Education*. <https://doi.org/10.1186/s12909-023-03212-6>
- Whyle, E. (2020). *Towards an Explanation of the Social Value of Health Systems*. <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2020.113344>
- Widiyastuty, F. (2023). Peran Sosial Budaya dalam Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Entikong. *Jurnal Promotif Preventif*. <https://journal.unpacti.ac.id/JPP/article/download/760/431/>
- Widjaja, G. (2023). *Pelayanan Kesehatan Bagi Pasien Menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan*. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/download/6066/4583/10192>
- Wulandari, A. (2025a). *Pengaruh Sosial Budaya Terhadap Pelayanan Kesehatan: Kajian Sistematis*. <https://id.scribd.com/document/730179987/Makalah-Pengaruh-Sosial-Budaya-Terhadap-Pelayanan-Kesehatan>
- Wulandari, A. (2025b). *Studi Kualitatif Pengobatan dan Warisan Budaya dalam Masyarakat Banjar: Integrasi Praktik Tradisional dan Layanan Kesehatan Modern*. <https://ejurnal.malahayati.ac.id/index.php/hjk/article/download/550/442/3192>